

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah berkewajiban memastikan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilaksanakan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan keuangan daerah sebagai salah satu urusan pemerintahan yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Ketentuan ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menekankan pentingnya pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penerapan prinsip *value for money* dalam penggunaan sumber daya publik.

Secara operasional, prinsip-prinsip tersebut dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban APBD. Selain itu, kewajiban penyusunan laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 memastikan bahwa evaluasi kinerja keuangan daerah dapat dilakukan secara objektif, konsisten, serta dapat dibandingkan antarperiode. Pada tingkat teknis,

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Keuangan daerah memiliki peranan yang sangat krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena pelaksanaan fungsi pemerintah daerah tidak akan berjalan secara optimal tanpa dukungan pendanaan yang memadai. Ketersediaan dan pengelolaan keuangan yang baik menjadi prasyarat utama dalam penyediaan pelayanan publik serta pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola keuangan secara cermat guna mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingannya secara mandiri.

Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan perencanaan keuangan yang terstruktur agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berlangsung secara terarah serta terkendali dalam satu periode anggaran. Kerangka pengelolaan tersebut kemudian dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai acuan dalam penggunaan anggaran. Pada tingkat provinsi, pengelolaan keuangan daerah juga diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik dapat tercermin dari bagaimana keuangan daerah dikelola secara efektif dan bertanggung jawab.

Pengelolaan keuangan yang baik akan mendorong tercapainya tujuan pembangunan daerah, sedangkan pengelolaan yang kurang optimal berpotensi menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menjamin akuntabilitas dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran tersebut, pemerintah daerah berpedoman pada berbagai regulasi, salah satunya Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2022 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, yang menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Selain mengacu pada regulasi di tingkat nasional dan provinsi, pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bandung juga berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan daerah tersebut menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengatur proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah.

Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis kinerja keuangan untuk menilai sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

Salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan keuangan daerah adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan digunakan sebagai alat untuk menilai sejauh mana suatu instansi atau lembaga mampu mengelola anggaran yang dimilikinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, pengelolaan dana desentralisasi dituntut untuk dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, salah satunya melalui penerapan konsep *value for money*.

Konsep *value for money* digunakan sebagai analisis dalam menilai kinerja keuangan dengan membandingkan antara perencanaan dan realisasi penggunaan anggaran pada program atau kegiatan yang dilaksanakan. Penilaian tersebut tidak hanya berfokus pada besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga pada keberhasilan pencapaian target yang telah direncanakan. *Value for money* menekankan tiga aspek utama, yaitu ekonomis dan efisiensi dalam alokasi biaya, serta efektivitas dalam pencapaian kualitas pelayanan. Dengan demikian, pengukuran kinerja keuangan berbasis *value for money* menitikberatkan pada aspek 3E, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Pengukuran kinerja keuangan memiliki peranan penting sebagai tolok ukur akuntabilitas suatu organisasi atau instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui pengukuran kinerja keuangan yang komprehensif, pemerintah daerah dapat menilai pemanfaatan sumber daya yang digunakan, keluaran atau hasil yang dihasilkan, serta dampak yang ditimbulkan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, pengukuran kinerja keuangan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung memiliki peran yang sangat penting sebagai perangkat daerah

yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kinerja keuangan BKAD menjadi cerminan kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh sebab itu, penilaian terhadap kinerja keuangan BKAD Kabupaten Bandung diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Untuk memberikan gambaran umum mengenai kinerja keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung, Tabel 1.1 menyajikan ringkasan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama tahun 2022 hingga 2024. Data tersebut digunakan untuk melihat kecenderungan realisasi anggaran serta mengidentifikasi kondisi awal pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 1. 1 Realisasi APBD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022-2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2022	631.015.940.701,00	536.462.368.406,00	85,02
2023	873.734.128.051,00	855.042.778.596,00	97,86
2024	880.721.719.287,00	874.088.938.210,00	99,25

Sumber: *LRA BKAD Kabupaten Bandung Tahun 2022-2024* (Diolah Peneliti,2026)

Terlihat pada data yang disajikan bahwa realisasi anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung selama tahun 2022– 2024 menunjukkan kecenderungan yang membaik dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, pada awal periode penelitian masih ditemukan realisasi anggaran yang belum sepenuhnya optimal karena belum memenuhi ketentuan minimal penyerapan anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.02 Tahun 2015. Kondisi tersebut

mengindikasikan bahwa kinerja keuangan BKAD Kabupaten Bandung masih memerlukan peningkatan, khususnya dalam aspek perencanaan dan pengelolaan anggaran agar sesuai dengan prinsip *value for money*.

Permasalahan kedua yang ditemukan adalah realisasi belanja BKAD Kabupaten Bandung yang belum sepenuhnya stabil pada setiap jenis belanja. Realisasi belanja cenderung menunjukkan variasi antar tahun, yang mengindikasikan adanya dinamika dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap kinerja keuangan BKAD Kabupaten Bandung. Untuk melihat kondisi tersebut secara lebih jelas, maka disajikan tabel berikutnya.

Tabel 1. 2 Realisasi Anggaran Belanja Langsung BKAD Kabupaten Bandung Tahun 2022-2024

Tahun/Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
Tahun 2022			
Belanja Pegawai	16.099.737.759,00	14.230.898.380,00	1.868.839.379,00
Belanja Barang dan Jasa	11.439.698.560,00	10.082.891.325,00	1.356.807.235,00
Belanja Modal	1.870.353.535,00	1.688.088.600,00	182.264.935,00
Total	29.409.789.854,00	26.001.878.305,00	3.407.911.549,00
Tahun 2023			
Belanja Pegawai	15.300.108.998,00	14.306.454.377,00	993.654.621,00
Belanja Barang dan Jasa	14.094.405.960,00	12.306.454.377,00	1.787.951.583,00
Belanja Modal	2.186.493.050,00	2.119.098.933,00	67.394.117,00
Total	31.581.008.008,00	28.732.007.687,00	2.849.000.321,00
Tahun 2024			
Belanja Pegawai	16.713.322.861,00	15.679.809.594,00	1.033.513.267,00
Belanja Barang dan Jasa	18.334.134.073,00	15.209.753.899,00	3.124.380.174,00
Belanja Modal	3.707.889.761,00	3.627.509.764	80.379.997,00
Total	38.755.346.695,00	34.517.073.257,00	4.238.273.438,00

Sumber: LRA BKAD Kabupaten Bandung Tahun 2022-2024 (Diolah Peneliti,2026)

Data yang tertera pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada BKAD Kabupaten Bandung selama tahun 2022–2024 masih menyisakan selisih antara

anggaran dan realisasi pada setiap jenis belanja. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa realisasi belanja belum sepenuhnya stabil dan cenderung mengalami variasi antar tahun anggaran. Selain itu, realisasi anggaran tersebut dapat dikatakan belum sepenuhnya optimal karena pada sebagian periode penelitian masih belum memenuhi ketentuan penyerapan anggaran secara maksimal.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penilaian kinerja keuangan tidak cukup hanya didasarkan pada capaian realisasi anggaran semata. Selama ini, evaluasi kinerja keuangan daerah masih dominan menitikberatkan pada aspek administratif dan kuantitatif, seperti persentase serapan anggaran. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya mampu menggambarkan kualitas pengelolaan anggaran maupun manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat, sehingga berpotensi mengabaikan efektivitas pelaksanaan program.

Analisis *value for money* diperlukan untuk menjawab celah ini karena menilai kinerja anggaran melalui tiga dimensi sekaligus: ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Kerangka ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan akuntabilitas, transparansi, dan orientasi pada hasil.

Berdasarkan hasil studi dokumen awal terhadap dokumen APBD, LRA, serta LKjIP BKAD Kabupaten Bandung Tahun 2022–2024, peneliti menduga bahwa kinerja keuangan BKAD belum sepenuhnya optimal. Dugaan ini muncul ketika ditinjau melalui tiga indikator utama *Value for money*, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Dari aspek ekonomis, terdapat kecenderungan bahwa penggunaan anggaran pada beberapa bagian belum sepenuhnya mencerminkan prinsip penghematan, sehingga realisasi belanja masih menunjukkan potensi pemborosan. Dari sisi efisiensi,

perbandingan antara input anggaran dan output yang dihasilkan tampak belum sejalan, sehingga pemanfaatan sumber daya belum mencapai tingkat efisiensi yang ideal. Sementara itu, dari aspek efektivitas, capaian program dan kegiatan belum seluruhnya merefleksikan ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan, sehingga hasil yang diperoleh belum optimal meskipun anggaran telah direalisasikan.

Kondisi-kondisi tersebut memperkuat dugaan bahwa pengelolaan keuangan BKAD Kabupaten Bandung memerlukan evaluasi yang lebih mendalam melalui analisis *Value for money* agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan anggaran selama periode 2022–2024.

Beberapa penelitian sebelumnya, seperti Wulansari (2024) dan Ariska (2023), telah menerapkan prinsip *value for money*, tetapi cakupannya masih terbatas pada satu perangkat daerah dan belum menilai kinerja keuangan secara menyeluruh. Belum ada penelitian yang secara komprehensif menilai pengelolaan anggaran BKAD Kabupaten Bandung dengan analisis ini.

Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam penilaian kinerja keuangan daerah, khususnya dalam mengukur aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas secara terpadu. Meskipun realisasi anggaran mengalami peningkatan, belum dapat dipastikan apakah penggunaannya telah mencerminkan prinsip pengelolaan keuangan yang optimal. Selain itu, keterkaitan antara penggunaan sumber daya (input) dengan hasil (output), serta tingkat pencapaian target kinerja, belum dianalisis secara komprehensif.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kinerja keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung. Melalui pendekatan *value for money* yang mencakup dimensi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan anggaran selama periode 2022 hingga 2024. Fokus utama diarahkan pada sejauh mana anggaran yang digunakan telah memenuhi prinsip ekonomis, menunjukkan efisiensi, serta mencapai tingkat efektivitas sesuai target yang ditetapkan.

Dengan analisis tersebut, penelitian ini tidak hanya menilai besarnya realisasi anggaran secara kuantitatif, tetapi juga mengkaji kualitas kinerja keuangan berdasarkan hubungan antara input, output, dan outcome. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung dalam meningkatkan pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Berdasarkan urgensi dan gap penelitian yang telah diuraikan, penulis memandang perlu untuk melakukan studi lebih lanjut melalui penelitian berjudul “Analisis *Value for money* Kinerja Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022-2024”.

B. Identifikasi Masalah

Terdapat beberapa rincian masalah yang perlu dianalisis dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan:

1. Realisasi belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung tahun 2022–2024 mengalami peningkatan, namun belum diketahui secara pasti

apakah penggunaan anggaran tersebut telah memenuhi prinsip ekonomis dalam pengelolaan keuangan daerah.

2. Pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya menunjukkan gambaran efisiensi secara terukur, karena masih diperlukan analisis yang mengaitkan antara penggunaan sumber daya (input) dengan hasil yang diperoleh (output).
3. Tingkat efektivitas kinerja keuangan daerah belum dapat diketahui secara komprehensif, khususnya dalam hal pencapaian target pendapatan dan keberhasilan program yang dilaksanakan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan dilatar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimana tingkat ekonomis kinerja keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022–2024 berdasarkan analisis *Value for money*?
2. Bagaimana tingkat efisiensi kinerja keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022–2024 berdasarkan analisis *Value for money*?
3. Bagaimana tingkat efektivitas kinerja keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022–2024 berdasarkan analisis *Value for money*?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung tahun anggaran 2022–2024 berdasarkan prinsip *Value for money*. Secara khusus, tujuan penelitian ini meliputi:

1. Mengetahui dan menganalisis tingkat ekonomis dalam kinerja keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022–2024.
2. Mengevaluasi tingkat efisiensi kinerja keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022–2024.
3. Menganalisis tingkat efektivitas kinerja keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022–2024 dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah.

E. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan analisis *value for money*. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian teori terkait pengelolaan anggaran serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada efisiensi, efektivitas, dan ekonomis penggunaan anggaran di sektor publik.

2. Manfaat Praktik

- a. Bagi penulis, penelitian ini menjadi salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan studi sarjana Administrasi Publik serta meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah.
- b. Bagi universitas, hasil penelitian ini dapat menambah khazanah literatur akademik di bidang administrasi publik dan menjadi sumber referensi bagi mahasiswa dan dosen dalam pengembangan studi terkait pengelolaan keuangan daerah.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi yang transparan mengenai pengelolaan anggaran daerah, sehingga meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran publik.
- d. Bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan strategis dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan agar lebih ekonomis, efisien, dan efektif sesuai dengan prinsip *value for money*, guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara optimal.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dipahami sebagai suatu alur pemikiran yang disusun secara sistematis untuk menggambarkan keterkaitan antar konsep berdasarkan kajian teori dan hasil telaah pustaka. Berdasarkan fenomena yang terjadi, realisasi anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung Tahun 2022–2024 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan daerah apabila tidak dianalisis menggunakan pendekatan yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya

realisasi anggaran belum dapat dijadikan sebagai satu-satunya ukuran dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu belum diketahuinya tingkat ekonomis dalam pengelolaan anggaran daerah, belum terukurnya tingkat efisiensi penggunaan sumber daya keuangan, serta belum tergambarkannya tingkat efektivitas dalam pencapaian target keuangan daerah. Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya suatu pendekatan yang mampu mengukur kinerja keuangan secara komprehensif.

Berdasarkan Patarai (2010), kinerja keuangan daerah merupakan cermin dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang terintegrasi, di mana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus selaras dengan perencanaan pembangunan guna menghindari inefisiensi yang dapat menghambat pencapaian tujuan daerah. Penekanan utama dalam kerangka ini adalah bahwa kualitas kinerja keuangan tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran secara administratif, melainkan dari kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan analisis anggaran secara kompeten untuk mencegah kebocoran serta memastikan bahwa setiap sumber daya keuangan dikelola secara efektif demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

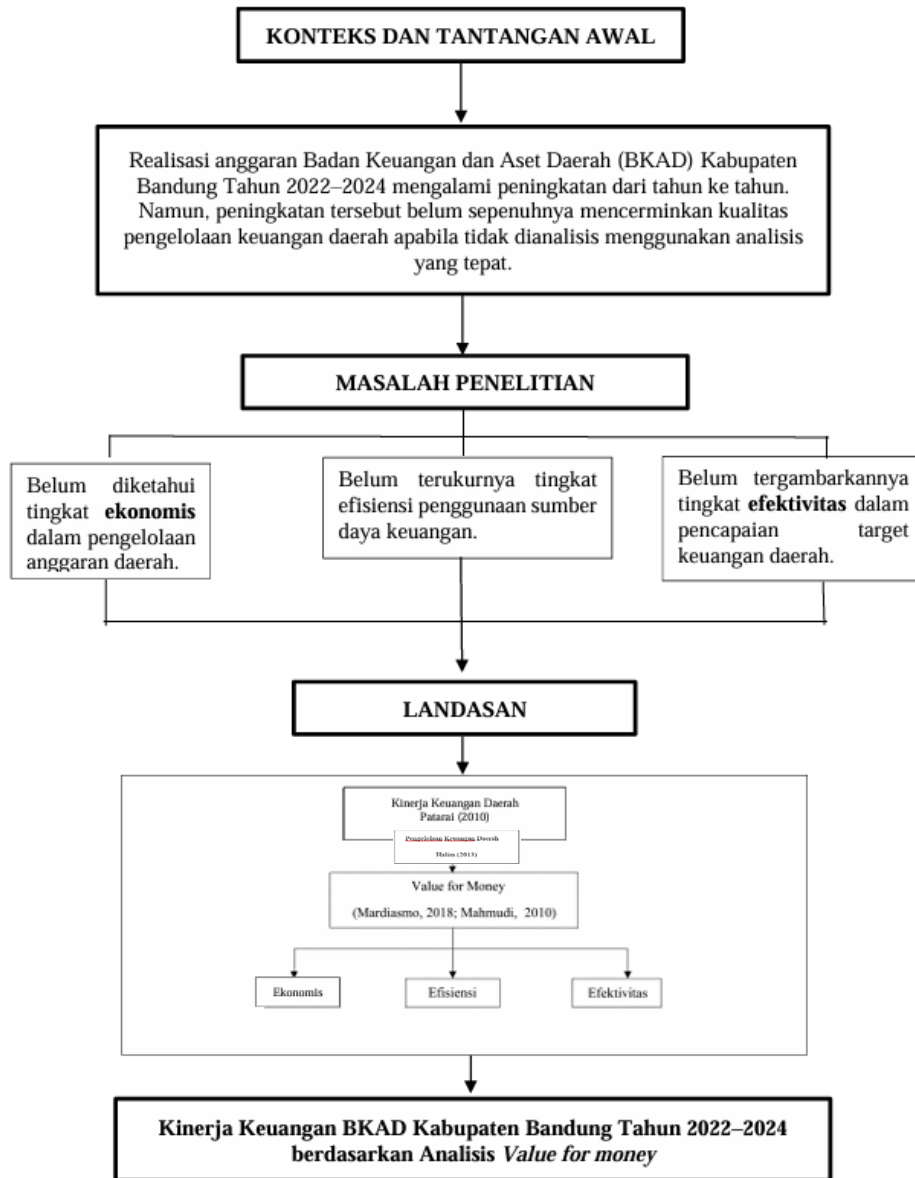
Sejalan dengan hal tersebut, menurut Halim (2013), pengelolaan keuangan daerah merupakan serangkaian kegiatan atau proses yang dilakukan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka-angka, yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban anggaran yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam konteks tersebut, pengelolaan keuangan daerah yang baik menuntut adanya keseimbangan antara penggunaan sumber daya dengan hasil yang dicapai. Artinya, setiap anggaran yang digunakan harus mampu memberikan manfaat yang optimal serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan suatu alat ukur yang tidak hanya menilai besarnya realisasi anggaran, tetapi juga mampu mengevaluasi kualitas penggunaan anggaran dari berbagai aspek kinerja.

Untuk mengukur kinerja keuangan daerah tersebut, penelitian ini menggunakan analisis Value for money sebagaimana dikemukakan oleh Mahmudi (2010) dan Mardiasmo (2018). Analisis ini menekankan pada tiga indikator utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Indikator ekonomis digunakan untuk menilai kesesuaian antara anggaran dan realisasi, indikator efisiensi untuk mengukur perbandingan antara input dan output, serta indikator efektivitas untuk menilai tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan

Melalui analisis ketiga indikator tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kinerja keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung Tahun 2022–2024 berdasarkan analisis Value for money. Dengan demikian, kerangka pemikiran ini menggambarkan alur penelitian yang dimulai dari fenomena, permasalahan, konsep kinerja keuangan daerah, hingga analisis menggunakan analisis Value for money untuk menghasilkan penilaian kinerja keuangan daerah secara komprehensif.

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah penulis berdasarkan Patarai (2010), Mahmudi (2010), dan Mardiasmo (2018)